

# JURNAL

## Ekonomi DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (JEPP)

**Volume: 4. NO. 01, JANUARI-JUNI 2011**



ISSN 1979-7338

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Taufik Hidayat, Lizar Alfansi, Yusnida

PENGARUH KESETARAAN GENDER  
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH  
(Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)  
Tahun 2000-2009  
Susiani, Handoko Hadiyanto, Bambang A Hermanto

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN PABRIK MINYAK GORENG  
DI PROVINSI BENGKULU  
Ardi Muhidin, M. Ridwan, Edy Rahmanto

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK  
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA  
Eva Juniarti, Ridwan Nurazi, Sunoto

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN  
MODAL BERGULIR EKONOMI KERAKYATAN TERHADAP KOPERASI  
WANITA  
DI KOTA BENGKULU  
Yenita Syaiful, Heri Sunaryanto, Ir Lela Rospinda

STRATEGI PENGEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL KAIN BESUREK DI KOTA BENGKULU  
Hengky Pratama, Retno Agustina Ekaputri dan Merri Anitasari

KESEDIAAN MEMBAYAR PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM  
DALAM KAJIAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA BENGKULU  
(TERMINAL BETUNGAN KE TERMINAL SUNGAI HITAM)  
Indrawansyah Putra Utama, Ketut Sukiyono, Bernardin

THE ANALYSIS OF EFFICIENCY IN THE USE OF PRODUCTION  
FACTORS OF SELF EMPLOYMENT ON EMPING MELINJO IN  
BENGKULU CITY

PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU

**JURNAL**  
**EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

***Vol. 4 NO. 01 JANUARI - JUNI 2011***

***ISSN: 1979-7338***

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA LUBUK LINGGAU

Taufik Hidayat, Lizar Alfansi, Yunsida..... 1-8

PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN)  
TAHUN 2000-2009

Susiaini, Handoko Hadiyanto, Bambang A Hermanto ..... 9-15

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN PABRIK MINYAK GORENG DI PROVINSI  
BENGKULU

Ardi Muhidin, M. Ridwan, Edy RahmantyoTH ..... 16-25

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK USAHA PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Eva Juniarti, Ridwan Nurazi, Sunoto..... 26-34

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN MODAL  
BERGULIR EKONOMI KERAKYATAN TERHADAP KOPERASI WANITA  
DI KOTA BENGKULU

Yenita Syaiful, Heri Sunaryanto, Ir Lela Rospinda ..... 35-45

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KAIN BESUREK  
DI KOTA BENGKULU

Hengky Pratama, Retno Agustina Ekaputri dan Merri Anitasari ..... 46-53

KESEDIAAN MEMBAYAR PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DALAM KAJIAN  
SISTEM TRANSPORTASI KOTA BENGKULU (TERMINAL BETUNGAN  
KE TERMINAL SUNGAI HITAM)

Indrawansyah Putra Utama, Ketut Sukiyono, Bernardin ..... 54-62

THE ANALISYS OF EFFICIENCY IN THE USE OF PRODUCTION FACTORS OF SELF  
EMPLOYMENT ON EMPING MELINJO IN BENGKULU CITY

Syamsul Bachri ..... 63-67

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK  
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

By :

### ABSTRACT

The purpose of this study are (a) Know the potential of the mining business tax category C minerals in North Bengkulu district, (b) Know the level of effectiveness of tax collection efforts extractive mining gologan C in north Bengkulu district, (c) Know the efforts that can be done to optimize mining business tax category C minerals in North Bengkulu district. Data used research is secondary data, the potential data, targets and realization of tax receipts extractive exploitation of class C from the government offices concerned. The method of analysis used is SWOT. Based on our research, obtained results that effective strategies that can be done in the tax collection efforts extractive exploitation of class C in North Bengkulu district are: (a) Improving the management of natural resources, especially extractive mining category C and increased resources; (b) Investment in the development of extractive mining environmentally sound class C; (c) The prevention of environmental vulnerability by enhancing apparatus in the field of mining and excavation impacts increased socialization that are not suitable *Environmental Impact Analysis* (AMDAL).

Key words: Potential, Realization, Withholding tax effectiveness, and category C minerals

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (a) Mengetahui potensi bisnis pajak pertambangan mineral dalam kategori C kabupaten Bengkulu Utara, (b) Mengetahui tingkat efektivitas upaya pengumpulan pajak ekstraktif pertambangan golongan C di utara kabupaten Bengkulu, (c) Tahu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan usaha pertambangan mineral pajak kategori C di kabupaten Bengkulu Utara. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, data potensi, target dan realisasi penerimaan pajak eksploitasi ekstraktif kelas C dari kantor-kantor pemerintah yang bersangkutan. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT. Berdasarkan penelitian kami, diperoleh hasil bahwa strategi yang efektif yang dapat dilakukan dalam upaya penagihan pajak eksploitasi ekstraktif kelas C di Kabupaten Bengkulu Utara adalah: (a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, pertambangan khususnya kategori C dan sumber daya ekstraktif meningkat; (b) Investasi dalam pengembangan ekstraktif pertambangan yang berwawasan lingkungan kelas C; (c) pencegahan kerentanan lingkungan oleh aparat meningkatkan di bidang pertambangan dan penggalian dampak peningkatan sosialisasi yang tidak cocok Analisis Dampak lingkungan (AMDAL).

Kata kunci: Potensi, Realisasi, efektivitas Pemotongan pajak, dan galian C

## PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu. Berdasarkan pembagian Mandala Geologi Tersier Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam daerah Busur Magmatik yang termasuk dalam rangkaian guru api Bukit Barisan yang membujur di sepanjang Pulau Sumatera. Sebagai konsekuensi dari keberadaanya, maka potensi bahan tambang banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil laporan Potensi Unggulan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2008, maka di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa bahan galian golongan C seperti: bahan galian golongan C-mineral industri seperti Koalin, Lempung, Obsidian, Batu Apung, Tras dan bahan galian golongan C-mineral bahan bangunan seperti: Andesit/Basalt, Pasir Vulkanik, dan Pasir-Kerikil (Batu Kali).

Seperti kita ketahui bahwa bahan galian golongan C adalah merupakan salah satu jenis bahan tambang yang wewenang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentu saja, daerah yang memiliki potensi jenis bahan galian golongan C ini seperti halnya Kabupaten Bengkulu Utara, dianggap sebagai daerah memiliki prospek dan peluang yang besar bagi peningkatan perekonomiannya, karena sektor ini memberikan kontribusi penting bagi peningkatan penerimaan daerah dalam bentuk PAD dan juga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga sektor ini dijadikan sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dan dieksplorasi.

## Rumusan Masalah

Seberapa besar potensi pajak usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara? Seberapa efektif pemungutan pajak usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara? Dan apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pajak usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara?

## Tujuan Penelitian

Mengetahui potensi pajak usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara, Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara, dan mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Purwodarminto (dalam Irwanto, 2008) yang dimaksud dengan pendapatan adalah perolehan atau hasil guna dari suatu pencaharian. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah sejumlah uang atau dana yang diperoleh dari usaha daerah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Sedangkan menurut Widayat (dalam Irwanto, 2008) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan-penerimaan lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai UU No.25 tahun 1999 terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, pada bab VIII pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah dan (4) lain-lain pendapatan yang sah.

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang pokok yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan pasal 80, yang menyatakan bahwa : dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 terdiri atas : (1) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, (2) dana alokasi umum dan, (3) dana alokasi khusus ketentuan lebih lanjut perihal dana perimbangan diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 1999.

### Pajak Daerah

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Kaho, 1991). Sedangkan menurut Sumahamidjaja dalam Irwanto (2008) pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sementara itu, Djajaningrat (dalam Irwanto, 2008) menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian

dari kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik Negara secara langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan umum.

### **Analisis SWOT**

Analisis “SWOT” diterapkan dalam tiga bentuk membuat kepuasan yang sifatnya strategik pertama : Analisis “SWOT” memungkinkan para pengambil keputusan kunci dalam satuan perusahaan menggunakan kerangka berpikir yang logis dalam pembahasan yang mereka lakukan yang menyangkut dalam situasi mana perusahaan berada.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pajak eksploitasi dan pemanfaatan bahan galian golongan C ini telah dilakukan beberapa orang peneliti di beberapa daerah sebelumnya. Namun demikian, fokus penelitiannya yang berbeda-beda. Irwanto (2008) telah melakukan penelitian tentang potensi bahan galian golongan C di Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak galian golongan C di Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp 674.112.000. Tingkat efektivitas pemungutan pajak galian golongan C berdasarkan hasil perhitungan adalah 83,84% yang berarti cukup efektif. Strategi terbaik yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak bahan galian golongan C adalah dengan membentuk tim terpadu yang profesional dalam pengelolaan pajak bahan galian golongan C yang melibatkan instansi-instansi terkait.

Sedangkan Bambang (2001) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Lombok Timur dan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Kinerja pemungutan pajak dari pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Lombok Timur memiliki kontribusi 5,01% per tahun;
2. Kinerja pemungutan pajak dari pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Lombok Timur memiliki tingkat efektivitas rata-rata sebesar 71,49% per tahun;
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Lombok Timur adalah PDRB, jumlah tenaga kerja, dan indeks harga implisit masing-masing sektor pertambangan dan pengalihan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menguraikan tentang suatu keadaan yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif (*descriptive research*) adalah meneliti dan berusaha untuk mendapatkan data yang aktual dan akurat, dimana data tersebut kemudian di bahas dan diuraikan secara sistematis serta disimpulkan untuk mendapatkan pemecahan dari masalah yang diteliti.

#### **Metode Pengambilan Data**

Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan dengan cara mencatat, memfotokopi data-data publikasi dan laporan instansi terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pengusaha di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Data Potensi Bahan Galian Golongan C**

Untuk melihat potensi bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara, dapat dilihat dari data sekunder (data laporan) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu. Berdasarkan pembagian Mandala Geologi Tersier Pulau Sumatera,

Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam daerah Busur Magmatik yang termasuk dalam rangkaian guru api Bukit Barisan yang membujur di sepanjang Pulau Sumatera. Sebagai konsekuensi dari keberadaanya, maka potensi bahan tambang banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil laporan Potensi Unggulan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2008, maka di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa bahan galian golongan C seperti: bahan galian golongan C-mineral industri seperti Koalin, Lempung, Obsidian, Batu Apung, Tras dan bahan galian golongan C-mineral bahan bangunan seperti : Andesit/Basalt, Pasir Vulkanik, dan Pasir-Kerikil (Batu Kali).

1. Koalin Kaolin merupakan massa batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah dan pada umumnya berwarna putih atau agak keputihan (Heru Irwanto, 2008). Kaolin mempunyai komposisi hidrous aluminium silikat ( $2\text{H}_2\text{O Al}_2\text{O}_3 2\text{SiO}_2$ ) dengan disertai material penyertainya.

Dua proses geologi pembentukan kaolin (kaolinisasi) adalah proses pelapukan dan proses alterasi hidrothermal pada batuan beku feldpatik, mineral-mineral potas aluminium silika dan feldspar diubah menjadi kaolin. Proses pelapukan terjadi pada permukaan atau sangat dekat dengan permukaan tanah, sebagian besar proses terjadi pada batuan beku. Endapan kaolin yang terjadi karena proses hydrothermal terdapat pada retakan-retakan, patahan, dan daerah permeable lainnya.

Kegunaan kaolin terutama untuk industri keramik (lebih dari 60% dari produksi kaolin di dunia), kertas, cat, kosmetik, farmasi, karet, pestisida, dan lain-lain. Mutu kaolin terutama ditentukan oleh kemurnian kimia, kecerahan (*brightness*) serta bentuk dan ukuran Kristal (butiran) dan besar butiran.

2. Lempung Jenis lempung yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara adalah jenis lempung residu yaitu lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Mutu lempung residu ini umumnya lebih baik dari lempung letakan. Komposisi lempung residu ini didominasi oleh mineral illit yang merupakan hasil pelapukan tufa laterit dan laterit di daerah yang relatif datar dan rendah. Kegunaan lempung ini untuk pembuatan keramik, batu bata, genteng, dan gerabah.
3. Batu Apung Batu apung terbentuk bila magma muncul ke permukaan dan bersentuhan dengan udara luar. Buih gas alam, dengan gas yang terkandung di dalamnya mempunyai kesempatan untuk keluar dan magma membeku dengan tiba-tiba pada letusan gunung api dengan ukuran dari kerikil sampai bongkahan, di samping itu juga bisa lelehan atau aliran permukaan, bahan lepas dan fragmen pada breksi gunung api. Keterdapatannya batu apung di Indonesia selalu berkaitan dengan rangkaian gunung api kuartir sampai tersier muda. Batu apung umumnya digunakan sebagai bahan penggosok, bahan ringan (*nonreaction*), campuran bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi, bahan saringan (filter), bahan isolator temperature tinggi dan sebagai campuran lumpur pemboran

### **Potensi Pajak Eksploitasi Bahan Galian Golongan C**

Perhitungan potensi pajak eksploitasi bahan galian golongan C didasarkan pada volume dan jenis baha galian yang telah dieksploitasi oleh pengusaha pertambangan baik bagi mereka yang sudah mempunyai SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) maupun yang belum memiliki SIPD di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara. Perhitungan didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008, karena data yang tersedia di instansi ini hanya untuk tahun 2008; sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan pengecekan.

Penelitian potensi pajak eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan secara sampling yang diambil berdasarkan area, meliputi 8 orang pengusaha yang memiliki SIPD dan 16 Orang pengusaha yang tidak memiliki SIPD yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan jenis bahan galian golongan C yang diusahakan atau dieksploitasi adalah pasir (pasir laut dan sungai), batu kali/sirtu (koral), andesit (batu gunung) dan tanah liat (lempung). Untuk harga satuan jenis-jenis bahan galian golongan didasarkan pada harga standar atau harga pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2005

Di Kabupaten Bengkulu Utara, potensi bahan galian golongan C menyebar di 6 Kecamatan (Laporan Dinas ESDM Kabupaten Bengkulu Utara, 2008) yakni Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Lais, Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Ketahun, dan Kecamatan Putri Hijau. Tiaptiap daerah penyebaran kecamatan memiliki potensi bahan galian golongan C yang berbeda baik dari jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu, pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki nilai potensi pajak yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena disamping jenis dan banyaknya sumber bahan galian golongan C, juga disebabkan karena banyaknya pekerja dan pengusaha yang bergerak di bidang pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Jika saja, semua potensi tersebut dapat terealisasi, tentu saja akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat diperuntukkan bagi perluasan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga terjadi pemerataan pembangunan wilayah. Jika pembangunan merata, maka akan muncul sentra-sentra ekonomi baru yang menandakan bahwa perekonomian masyarakat berkembang.

### **Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan**

Galian C di Kabupaten Bengkulu Utara Analisis efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak bahan galian golongan C digunakan untuk mengukur proporsi antara realisasi penerimaan pajak dengan target atau potensinya di Kabupaten Bengkulu Utara yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemungutan pajak bahan galian golongan C telah efektif atau belum. Efektivitas pemungutan pajak dikatakan efektif atau semakin efektif jika proporsi nilai realisasi penerimaan pajak



mendekati atau melebihi nilai target atau potensinya.

Untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan pajak eksploitasi bahan galian golongan C digunakan dua metode perhitungan yakni : -Membandingkan nilai realisasi penerimaan dengan rencana atau target penerimaan pajak eksploitasi bahan galian golongan C -Membandingkan nilai nilai realisasi penerimaan dengan potensi pajak eksploitasi bahan galian golongan C. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas ini, ditunjukkan dalam angka persentase, di mana semakin besar nilai persentase dan mendekati angka 100%, maka pengelolaan pajak eksploitasi dan pemanfaatan bahan galian golongan C semakin efektif. Sebaliknya, jika semakin kecil nilai persentase, maka pengelolaan pajak eksploitasi dan pemanfaatan bahan galian golongan C semakin tidak efektif.

Standarisasi nilai efektivitas menurut Departemen Dalam Negeri (dalam Herman, 2001) adalah sebagai berikut : -Koefisien efektivitas bernilai di bawah 40%, maka sangat tidak efektif -Koefisien efektivitas bernilai antara 40-60%, maka tidak efektif -Koefisien efektivitas bernilai antara 61-80%, maka cukup efektif -Koefisien efektivitas bernilai antara 81-99%, maka efektif. Koefisien efektivitas bernilai sama dengan atau sebesar 100%, maka sangat efektif

Tabel 4.2 Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara

N o	Tah un	Potensi	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	
1	2004	0	125.000.000	68.201.437	0	54,56
2	2005	0	115.000.000	77.330.051	0	67,24
3	2006	0	175.000.000	122.112.513	0	69,78
4	2007	0	200.000.000	75.461.830	0	37,73
5	2008	542.052.000	250.000.000	125.460.315	23,15	50,18
Rerata					4,63	55,90

Sumber : Data Sekunder Dinas ESDM Kabupaten Bengkulu Utara, 2008

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak BGGC sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa pemungutan pajak BGGC dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 tidak efektif. Hal ini terlihat dari nilai koefisien rata-rata efektivitas 5 (lima) tahun tersebut sebesar 55,90%. Namun, jika dirinci per tahunnya, hanya pada tahun 2005 dan tahun 2006 pemungutan pajak BGGC di Kabupaten Bengkulu Utara cukup efektif (berbasis target). Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien efektivitas untuk tahun tersebut sebesar 67,24% dan 69,78%.

Selanjutnya, khusus untuk tahun 2007, efektivitas pemungutan pajak BGGC di Kabupaten Bengkulu Utara sangat buruk (tidak efektif), di mana koefisien efektivitas yang diperoleh hanya sebesar 37,73%. Kondisi ini terlihat dari data bahwa target sebesar Rp 200.000.000,- yang diinginkan pada tahun tersebut tidak terpenuhi yakni hanya tercapai Rp 75.461.830 saja.

## Pembahasan

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 4.5 tingkat efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Kabupaten Bengkulu Tahun 2004-2008 dengan menggunakan metode penghitungan penetapan target menunjukkan rata-rata sebesar 55,90 persen pertahunnya dengan kisaran efektivitas antara 37,73 – 69,75 persen. Koefisien efektivitas rata-rata sebesar 55,90 persen ini termasuk kategori tidak efektif sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh departemen Dalam Negeri, karena berada diantara 40-60 persen. Selama periode pengamatan, efektivitas berfluktuasi dengan pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 69,78 persen dan pencapaian terendah tahun 2007 sebesar 37,73 persen.

Pada tahun 2006 dinyatakan cukup efektif karena target yang ditetapkan hanya didasarkan pada target (perkiraan) realisasi tahun sebelumnya, sedangkan pada saat itu terjadi peningkatan permintaan terhadap bahan galian golongan C sebagai akibat adanya pemekaran kabupaten pemekaran baru, yang sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang relatif banyak memanfaatkan material dari bahan galian golongan C, sehingga realisasi penerimaan pajaknya cukup besar.

Penghitungan efektivitas dengan menggunakan metode perhitungan potensi yang dilakukan untuk periode pengamatan tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 23,15 persen. Koefisien efektivitas realisasi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk tahun 2008 sebesar 23,15 persen ini berarti termasuk kategori sangat tidak efektif sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri yang berada pada kisaran dibawah 40 persen, artinya kemampuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pemungutan pajak dengan memanfaatkan potensi pajak yang ada masih sangat tidak efektif.

#### **Faktor Internal, Eksternal, dan Analisis SWOT**

Dalam usaha pemungutan pajak eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu, ada 6 (enam) tahapan kegiatan, yang meliputi : identifikasi potensi dan pengusaha, perizinan, penetapan, penyetoran, dan penagihan. Dalam tahapan-tahapan kegiatan tersebut, tentu saja terdapat beberapa kekuatan, hambatan, peluang, dan ancaman yang akan diidentifikasi melalui analisis SWOT. Kekuatan dan kelemahan diidentifikasi sebagai faktor internal (*internal factors*) sedangkan peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal (*external factor*). Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam usaha pemungutan pajak eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) Usaha Pemungutan Pajak Eksploitasi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara

No	Kegiatan	Faktor Internal	
		Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
1	Identifikasi dan Eksploitasi	-BU memiliki potensi BGGC yang cukup besar. -Data potensi lengkap dan akurat - Adanya sarana dan prasarana produksi	-Kurangnya tenaga ahli pertambangan dan lingkungan -Potensi BGC belum tersosialisasi -Ada beberapa wilayah berpotensi yang tidak dapat dieksploitasi
2	Perizinan	-Dinas ESDM mempunyai data lengkap -Data objek pajak jelas -Obyek pajak bisa dipantau	-Dispenda tidak memiliki data akurat - Koordinasi lintas sektoral belum optimal -Proses perizinan berbelit-belit - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengurusan izin -Proses izin usaha yang lama -Masih sedikitnya wajib pajak yang mengurus izin
3	Penetapan Pajak	-UU No 34 Th 2000 & Perda No 34 Th 2005 -Adanya instansi pemungut pajak -Adanya SKPD & SSPD utk memperkecil kebocoran -Adanya upah pungut	-Adanya Perda No 04 Th 2006 menimbulkan kerancauan -Kurangnya tenaga teknis yg profesional -Relatif jarang inspeksi rutin ke lokasi-lokasi pertambangan
No	Kegiatan	Faktor Internal	
		Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
4	Penyetoran Pajak	-Tempat penyetoran pajak di dinas/instansi sebelum ke BPD	-Wajib pajak enggan ke tempat penyetoran

#### **Pengembangan investasi di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang berwawasan lingkungan**

Hal ini didukung oleh interaksi antara kekuatan 1: Adanya sarana dan prasarana produksi dengan pasar yang masih cukup luas baik di dalam maupun luar daerah. O-1: UU No. 34 Th 2000 dan Perda No 34 Tahun 2005 sebagai konsekuensi pemberlakuan Otonomi Daerah di identifikasikan berhubungan dengan W-1, Kurangnya tenaga ahli pertambangan dan lingkungan W-9, Kurangnya tenaga teknis yang profesional W-5, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Maka alternatif strategi yang sesuai adalah: Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam khususnya pertambangan bahan galian golongan C dan Peningkatan Sumberdaya Manusia O-6 .

Tersedianya Infrastruktur yang mendukung Investasi berinteraksi dengan S-2, Data potensi yang lengkap dan akurat, S-3, Adanya sarana dan prasarana produksi . Maka alternatif strategi yang sesuai adalah: Pengembangan Infrastruktur



pendukung Investasi khususnya pertambangan bahan galian golongan C Ancaman (T-3: Kerusakan lingkungan berinteraksi T-1: Belum ada AMDAL serta berinteraksi dengan W-5 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan T-9.

Efektivitas penegakan hukum tidak berjalan sesuai ketentuan menggambarkan adanya potensi kerawanan pengrusakan lingkungan dan pengambilan bahan tambang yang tidak sesuai dengan aturan sebagai akibat ketidak tahuan masyarakat akan dampak yang akan timbul serta lemahnya pengawasan dari petugas terkait. Maka alternatif strategi yang sesuai adalah: Pencegahan kerawanan pengrusakan lingkungan dengan meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pertambangan serta peningkatan sosialisasi dampak penggalan yang tidak sesuai AMDAL.

Ancaman (T-6): Terjadinya kolusi berinteraksi dengan (W-11), Aturan baku pelaksanaan penagihan pajak belum ada. Dan (W-8), Masih sedikitnya wajib pajak yang mengurus izin. menggambarkan potensi pajak yang belum dioptimalkan sehingga rawan kebocoran. Maka alternatif strategi yang sesuai adalah: Pengoptimalan penarikan pajak dengan arah kebijakan, meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan dan effektivitas pertambangan bahan galian golongan C.

### **Critical Success Factor (CSF)**

*Critical Success Factor* Pemerintah Pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C adalah sebagai berikut:

1. Data potensi yang lengkap dan akurat
2. Potensi BBGC yg cukup besar
3. Obyek pajak dapat di pantau
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
5. Jarangnya inspeksi rutin ke lapangan
6. Potensi BGGC belum tersosialisasi
7. Pasar yang masih cukup luas baik di dalam maupun luar daerah
8. Kebutuhan BGGC yang terus meningkat
9. UU No. 34 Th 2000 dan Perda No 34 Tahun 2005
10. Kerusakan lingkungan
11. Terjadinya kolusi

Strategi Berdasarkan analisis SWOT dan CSF dapat dirumuskan kembali secara spesifik strategi Pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam khususnya pertambangan bahan galian golongan C dan Peningkatan Sumberdaya Manusia.

Strategi 2: Pengembangan investasi di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang berwawasan lingkungan

Strategi 3: Pencegahan kerawanan dalam pengrusakan dan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pertambangan serta peningkatan sosialisasi dampak penggalan yang tidak sesuai AMDAL

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi pajak eksploitasi bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp542.052.000,- dengan realisasi sebesar Rp125.460.315.
2. Efektivitas pemungutan pajak eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perhitungan dengan metode perhitungan penetapan target untuk tahun 2004 – 2008 adalah rata-rata sebesar 55,90 % yang berarti tidak efektif
3. Tingkat efektivitas yang didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan realisasi-potensi untuk tahun 2008 adalah sebesar 23,15%, yang berarti sangat tidak efektif.
4. Strategi efektif yang dapat dilakukan dalam usaha pemungutan pajak eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara adalah: (a) peningkatan pengelolaan sumberdaya alam khususnya pertambangan bahan galian golongan C dan peningkatan SDM, (b) pengembangan investasi di bidang pertambangan bahan galian golongan C berwawasan lingkungan, dan (c) pencegahan kerawanan pengrusakan lingkungan dengan meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pertambangan serta peningkatan sosialisasi dampak penggalan yang tidak sesuai AMDAL.

### **Saran**

Dengan bertitik tolak pada kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pajak eksploitasi

bahan galian golongan C dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yakni:

- a) Besarnya potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari hasil eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan bahan galian golongan C harusnya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan target penerimaan pajak tiap tahunnya oleh Dispenda Kabupaten Bengkulu Utara sehingga akan lebih memacu untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari pajak ini.
- b) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajaknya hendaknya ada koordinasi lintas sektoral seperti Dispenda dan Dinas ESDM, termasuk dengan aparat kecamatan atau desa/kelurahan setempat sebagaimana yang telah dilakukan pada pajak bumi dan bangunan, karena aparat inilah yang lebih tahu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya tentunya juga harus didukung dengan dana yang memadai dengan tetap memperhatikan skala efisiensi.
- c) Upaya atau strategi prioritas yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pengelolaan potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah adalah membentuk tim terpadu yang profesional dalam pengelolaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang melibatkan instansi-instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devas, N. Binder, et.al, 1999. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Herman, Y.K., 2001. Efektivitas Pengelolaan Bahan Tambang, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwanto, Heru, 2008. Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepahiang, Tesis Program Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Bengkulu, tidak dipublikasikan.
- Kaho, Riwu, 1991. Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C, Jenis Lepas di Daratan, Kementrian Lingkungan Hidup RI, Jakarta.
- Kuncoro, 1995. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid 1, terjemahan Abdullah, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Mardiasmo dan Makhfath, 2000. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Meningkatkan PAD, Modul Kursus Keuangan Daerah, FEUGM, Yogyakarta.
- Muhi, dkk, 2000. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad, 1998. Metode Penelitian, PT Ghalia, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salusu, J., 1996. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Non Profit, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sidik, 1994. Pajak Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta.